

## ABSTRACT

*Cases of violence in the Tangerang district have increased from 152 cases in 2020 to 154 cases in 2021. Due to the vast area with 29 sub-districts and 174 villages or sub-districts, not all cases of violence that occur can be reported. Lack of public knowledge about violence makes people afraid to report it, embarrassed because they feel cases of violence are a disgrace and don't know where to report it. The Tangerang Regency Government's efforts to minimize cases of violence that occur include forming the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). Subjects in this study totaled 5 (five) people with 2 (two) main informants, 2 (two) key informants and 1 (one) additional informant. The research method used in this research is descriptive through a qualitative approach and obtained by in-depth interviews with several informants, observation, and document review. Based on the results of research on the Human Resources (HR) factor, P2TP2A still experiences deficiencies in terms of the number and capabilities of its members, because the average is retired and their age is old. So that case handling becomes slow and victims cannot be handled quickly. In addition, P2TP2A Tangerang Regency also does not have permanent psychologists, which results in slower psychological services for victims. This was also based on the results of a document review that the existing educational background did not meet the needs. In the Facilities and Infrastructure factor, the facilities and infrastructure that are needed to support their activities are laptops/computers, infocus, workspaces, tables, chairs and operational vehicles. Because the existing infrastructure is missing and damaged, especially infocus and screens, even though this is really needed for outreach. Regarding the budget factor, the funds used to handle cases of violence against children in Tangerang Regency are considered insufficient, because there is only a budget for handling but there is still no prevention. On the Cooperation factor, the cooperation that is currently established has been able to help handle cases of violence against children. However, prevention and outreach programs related to the dangers of violence against children need support or cooperation with other agencies, both government and private. The researcher gave advice on the Human Resources factor to form P2TP2A volunteers at the village level to build networks. If there are cases of village volunteers, it can be faster to do outreach. In addition, to propose for the recruitment of permanent administrative staff and psychologists. In terms of facilities and infrastructure, it can be proposed, especially the need for operational cars and facilities for outreach activities. In the current budget, funds are available so that they are maximized and prioritized for handling victims and it can be proposed for future budgets to have funds for prevention. On the Cooperation factor, it is necessary to increase cooperation with private institutions, schools, neighborhoods to the citizens Association a level for prevention programs in the form of outreach, distribution of brochures explaining the dangers of violence against children.*

## ABSTRAK

Kasus kekerasan di kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari 152 kasus pada tahun 2020, menjadi 154 kasus pada tahun 2021. Karena luasnya wilayah dengan 29 Kecamatan dan 174 Desa atau Kelurahan kasus kekerasan yang terjadi tidak semuanya dapat dilaporkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan membuat masyarakat menjadi takut untuk melapor, malu karena merasa kasus kekerasan adalah aib dan tidak tahu harus melapor kemana. Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi yaitu diantaranya membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Subjek pada penelitian ini berjumlah 5 (Lima) orang dengan 2 (Dua) informan utama, 2 (Dua) informan kunci dan 1 (Satu) informan tambahan. Metode dalam penelitian yang

digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan didapatkan dengan wawancara secara mendalam kepada beberapa informan, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM) pada P2TP2A masih mengalami kekurangan dari segi jumlah dan kemampuan yang dimiliki para anggotanya, karena rata-rata adalah pensiunan dan usia mereka sudah sepuh. Sehingga penanganan kasus menjadi lambat dan korban tidak bias ditangani dengan cepat. Selain itu P2TP2A Kabupaten Tangerang juga belum memiliki tenaga psikolog tetap yang mengakibatkan pelayanan psikologi untuk korban menjadi lebih lambat. Hal ini juga didasarkan hasil telaah dokumen bahwa latar belakang pendidikan yang ada belum sesuai kebutuhan. Pada faktor Sarana dan Prasarana bahwa sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan mereka adalah laptop/komputer, infocus, ruang kerja, meja kursi dan kendaraan operasional. Karena sarana prasarana yang ada kondisinya ada yang hilang dan rusak terutama infocus dan layar, padahal ini sangat dibutuhkan untuk sosialisasi. Pada faktor anggaran dana yang digunakan untuk penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang dianggap masih kurang, karena hanya ada anggaran untuk penanganan saja tapi untuk pencegahan masih belum ada. Pada faktor Kerjasama untuk kerjasama yang terjalin saat ini sudah mampu untuk membantu penanganan kasus-kasus kekerasan pada anak. Namun untuk program-program pencegahan dan sosialisasi terkait bahaya kekerasan pada anak perlu dukungan atau kerjasama dengan instansi-instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Peneliti memberikan saran pada faktor Sumber Daya Manusia agar dibentuk relawan P2TP2A tingkat desa untuk membangun jejaring jika ada kasus relawan desa bias lebih cepat untuk melakukan penjangkauan. Selain itu juga agar mengusulkan untuk rekrutmen tenaga administrasi dan psikolog tetap. Pada faktor Sarana dan Prasarana agar dapat di usulkan terutama kebutuhan mobil operasional dan sarana untuk kegiatan sosialisasi. Pada anggaran dana yang tersedia saat ini agar dimaksimalkan dan diprioritaskan untuk penanganan korban dan dapat diusulkan untuk anggaran yang akan datang ada dana untuk pencegahan. Pada faktor Kerjasama perlunya peningkatan kerjasama dengan instansi swasta, sekolah-sekolah, lingkungan tempat tinggal sampai tingkatan RT/RW untuk program-program pencegahan berupa sosialisasi, pembagian brosur penjelasan bahaya kekerasan pada anak.